

## Ekonomi Kelembagaan

# Pendekatan Institusional Bangun Ketahanan Pangan



**Florentinus Nugro Hardianto**  
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas  
Sonata Darma

eceran beras, kontroversi kinerja produksi pangan, paradoks data perberasan, rendahnya upah buruh tani, mahalnya biaya produksi padi, inefisiensi sistem usaha tani dan penurunan kesejahteraan petani.

Meskipun keausaltannya masih menjadi perdebatan, bisa jadi faktor kemiskinan diduga menjadi akar masalahnya. Secara umum bisa dikatakan Indonesia masih belum berhasil keluar dari empat masalah dimensi pangan sesuai ukuran FAO (2008), yakni dimensi ketersediaan (*availability*), aksesibilitas (*accessibility*), pemanfaatan (*utilization*), dan stabilitas (*stability*).

Indonesia sebenarnya tidak kalah gencarnya dalam mengupayakan ketahanan pangan bagi masyarakatnya. Kementerian Pertanian misalnya telah menetapkan empat arah kebijakan yang diharapkan bisa menuntaskan masalah pangan *Pertama*, meningkatkan produksi padi dan pangan lain. *Kedua*, melancarkan distribusi pangan dan akses

pangan masyarakat. *Ketiga*, meningkatkan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat. *Keempat*, mengurangi gangguan produksi pangan.

Dalam membangun ketahanan pangan yang lebih efektif, sudah saatnya untuk lebih memperhatikan faktor institusional. Selama ini berbagai pendekatan disinyalir belum memperhatikan sisi institusional dan masih cenderung bersifat non-institusional. Hasilnya, masalah pangan terkesan muncul tanpa henti. Untuk itu penting untuk mencoba menggunakan pendekatan institusional dalam menangani masalah pangan.

Selanjutnya tujuan pendekatan institusional bukan semata-mata kepentingan individual dan terkait masalah harga tetapi demi kepentingan kolektif dan kepentingan masyarakat yang di dalamnya termasuk kepentingan kelembagaan sosial, dan struktur sosial yang lebih baik. Benang merah dari semua itu adalah bahwa pendekatan

an institusional yang mengindikasikan teori ekonomi institusional berupaya menyelesaikan problem praktis seperti masalah ketahanan pangan dengan memperhatikan seluruh aspek yang terlibat dan mendekatinya secara multidisiplin sehingga tidak cukup aspek ekonomi tetapi juga aspek non-ekonomi.

Sejumlah permasalahan pangan hendaknya mulai ditangani secara institusional. Masalah tingginya harga eceran beras domestik misalnya, hendaknya mulai ditangani dengan melibatkan semua *stakeholders* terkait, menciptakan mekanisme penurunan harga eceran beras domestik yang berkesinambungan dan bertujuan demi kesejahteraan rakyat secara umum.

Masalah lain seperti mahalnya biaya produksi padi dan inefisiensi sistem usaha tani hendaknya juga diawali dengan pelibatan semua *stakeholders* terkait pengembangan proses produksi dan sistem usaha tani yang lebih efektif dan

efisien secara *sustainable* dan sistemik demi kesejahteraan masyarakat.

Pendayagunaan kembali potensi dan kearifan lokal yang mendukung keberhasilan proses produksi pangan yang ada di suatu wilayah hendaknya juga menjadi pertimbangan penting.

Demikian garis besar pendekatan institusional tersebut maka diharapkan turut serta membangun ketahanan pangan di Indonesia. Pendekatan institusional juga diharapkan dapat melengkapi keterbatasan pendekatan lain yang cenderung non-institusional. Sehingga, ketahanan pangan pada akhirnya bisa tercapai. ■

